



**STRATEGI PENGUATAN KARAKTER BANGSA MELALUI PEMBELAJARAN
PPKn MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**

Harry Sugara ^{1*}, Suharno ¹

¹Universitas Negeri Yogyakarta

¹Jl. Colombo No. 1, Depok, Sleman 55281, Yogyakarta, Indonesia

* Corresponding Author. Email: harrysugara77@gmail.com,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) strategi penguatan karakter bangsa melalui perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran PPKn menghadapi MEA dan; (2) evaluasi penguatan karakter dalam pembelajaran PPKn. Penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis studi kasus di SMK Negeri 5 Yogyakarta. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan model Creswell yang diawali dengan mempersiapkan data, membaca keseluruhan data, melakukan koding data, menghubungkan tema-tema, dan menginterpretasi tema-tema. Penelitian ini menghasilkan tiga temuan. Pertama, strategi penguatan karakter bangsa pada perencanaan pembelajaran PPKn yaitu: (1) mengidentifikasi nilai karakter religius, nasionalis, dan karakter kerja dan, (2) menganalisis materi PPKn dengan isu nasionalisme, regional, dan internasional. Kedua, strategi penguatan karakter bangsa pada tahap pelaksanaan pembelajaran PPKn dengan cara: (1) penguatan nasionalisme berbasis budaya dengan menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu wajib nasional, (2) gerakan melek informasi berbasis religi dan IPTEK, (3) isu MEA dibahas sebagai bentuk tantangan non-militer di bidang ekonomi melalui metode pembelajaran *discovery learning* dan *problem based learning*. Ketiga, evaluasi karakter dilakukan dengan kegiatan curah pendapat antarguru dan penilaian sikap.

Kata kunci: karakter, PPKn, MEA.

***REINFORCEMENT NATIONAL CHARACTER STRATEGY THROUGH CIVICS
EDUCATION LEARNING TO FACE ASEAN ECONOMIC COMMUNITY***

Abstract

This study aimed to describe: (1) strategy of reinforcing national character through the planning and implementation of civic education learning to face MEA, (2) evaluation of character reinforcement in civic education learning. The approach used in this research was qualitative with the type of case study at SMK Negeri 5 Yogyakarta. Test of data validity was done by triangulation technique. Data collection was done by interview, observation, and documentation. Research data were analyzed using Cresswell model with the steps preparing data, reading the entire data, performing data coding, linking themes, and interpreting the themes. This study yielded three findings. First, the strategy of reinforcing national character through civic education learning planning was implemented through: (1) identify relevant character values of religious, nasionalism, and character values of work, (2) analyze the civic education materials with national, regional and international issues. Second, the strategy of strengthening the national character through the implementation of learning civic education was implemented through; (1) strengthening cultural-based nationalism by singing nationality anthem and national mandatory song, (2) information literacy movement with religious-based literacy culture and science and technology, (3) issues of MEA discussed as non-military challenge in economic field through discovery learning method and problem based learning. Third, the evaluation of character is done by teachers with brainstorming activities between teachers and attitude assessment.

Keywords: character, civic education, MEA

Pendahuluan

Semakin kompleksnya tantangan global dan regional tanpa disadari telah mampu merobek-robek nasionalisme dan melunturkan identitas-identitas bangsa (*national identity*) sebagai wujud kedaulatan negara. Semakin meningkatnya interkoneksi kerjasama antar-negara yang semakin intensif, hingga memunculkan wujud perdagangan global dan regionalisasi ekonomi yang memantik sikap interdependen dan kompetisi pertumbuhan ekonomi antar-negara. Salah satunya melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai perwujudan integrasi komunitas ekonomi dan regionalisasi perdagangan bebas negara-negara ASEAN yang tengah dihadapi negara Indonesia saat ini.

Terdapat tiga hal positif menurut Abdurofiq (2015, p. 250) atas dibukanya perdagangan bebas dikawasan ASEAN yang diprediksi mampu mendorong pembangunan ekonomi Indonesia. Pertama, mendorong pendapatan negara melalui ekspor dan impor. Kedua, membuka peluang industrialisasi baru di kawasan Indonesia yang sempat lesu karena krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Ketiga, memperluas lapangan kerja profesional bagi ledakan generasi-generasi muda baru di Indonesia serta memberikan kesempatan berkarir diberbagai wilayah di ASEAN.

Ditinjau dari segi manfaat, maka tingkat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia mutlak harus dicapai dalam ajang Masyarakat Ekonomi ASEAN ini. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan McKinsey Global Institute (2012, p.13) bahwa, perekonomian Indonesia memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar ke-16 di dunia, potensi negara kepulauan yang dinamis ini berpotensi menempati peringkat terbesar ke-7 pada 2030 dengan jumlah 1,8 triliun dolar AS pada peluang pasar dalam jasa konsumen, agrikultur dan perikanan, sumber daya energi dan pendidikan. Hal ini tentu menjadi harapan besar dan potensi kemakmuran untuk dikelola dengan sumber daya manusia yang sebaik mungkin demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun pada sisi lain, setidaknya terdapat tiga hal penting yang perlu diperhatikan oleh Indonesia dalam menghadapi MEA. Pertama, Tingkat pengangguran pengangguran terbuka. Berdasarkan data yang dilansir oleh Ba-

dan Pusat Statistik jumlah tamatan taraf SMA sempat mengalami penurunan di tahun 2014. Sementara pada taraf SMK, diploma I/II/III dan universitas dari tahun 2013 hingga 2015 terus mengalami peningkatan jumlah pengangguran terbuka (Badan Pusat Statistik, 2015).

Kedua, daya saing Indonesia. versi *World Economic Forum* (WEF) melalui "*The Global Competitiveness Report 2015*", peringkat daya saing ekonomi Indonesia menurun pada tahun 2016, dari urutan ke-34 pada tahun lalu turun pada urutan ke-37 dari 140 negara. Daya saing Indonesia cukup tertinggal dari Singapura yang berada di peringkat ke-2, Malaysia di peringkat ke-18 dan Thailand di urutan ke-32. Di ASEAN, Indonesia tercatat lebih unggul dari Filipina (47), Vietnam (56), Laos (83), Kamboja (90), dan Myanmar (131) (Schwab, 2015). Tentu hal ini akan berpengaruh besar terhadap produktifitas bangsa yang dapat menimbulkan instabilitas daya saing Indonesia dalam persaingan ekonomi global.

Ketiga, pembangunan sumber daya manusia. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, pembangunan sumber daya manusia negara Indonesia tahun 2014 menduduki urutan ke-5 dari 10 negara. Indonesia juga masih jauh tertinggal dengan negara lainnya seperti Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapore. Mulai pada aspek kesejahteraan, kesehatan, ekonomi, pendidikan dan sebagainya sehingga hal ini perlu menjadi suatu refleksi bagi Indonesia (UNDP, 2015).

Tidak mengherankan apabila Cogan & Derricot (1998, pp. 94-95) memaparkan adanya peningkatan tantangan global abad ke-21 yang perlu diperhatikan. Mulai dari kesenjangan ekonomi antara negara-negara, perkembangan teknologi informasi yang dramatis, konflik kepentingan antara negara-negara berkembang, sulitnya mengembangkan keyakinan dan kebaikan bersama, kejahatan terkait narkoba tanggung jawab sosial yang akan menurun, dan perilaku konsumerisme akan semakin mendominasi kehidupan sosial.

Fakta lain yang terjadi saat ini adalah merebaknya tayangan di beberapa stasiun televisi swasta telah menjadi basis pemasaran film-film industri negara India dan Korea. Hal ini semakin diperparah dengan cukup tingginya animo masyarakat sebagai penonton dalam negeri sendiri sekaligus sebagai konsumen pasar negara lain yang begitu menguntungkan bangsa lain. Pada industri kerja, fakta dari dampak

MEA pun terlihat dari adanya invansi pekerja-pekerja asing hingga menjadi ladang subur bagi pekerja ilegal yang sempat menghebohkan pemberitaan di berbagai media massa. Apabila peserta didik menjadi asing dari budaya terdekat maka dia tidak mengenal dengan baik budaya bangsa dan dia tidak mengenal dirinya sebagai anggota budaya bangsa. Dalam situasi demikian, dia sangat rentan terhadap pengaruh budaya luar dan bahkan cenderung untuk menerima budaya luar tanpa proses pertimbangan (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010, p.5).

Untuk itu penguatan karakter kebangsaan merupakan salah satu strategi fundamental pendidikan yang memiliki urgensi mendasar untuk segera diimplementasikan pada tiap satuan tingkat pendidikan. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia saat ini melalui salah satu butir Nawacita melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang telah dimulai sejak 2016. Sebagai salah satu strategi dalam menggerakkan pendidikan karakter, Penguatan Pendidikan Karakter lebih mengintegrasikan, memperdalam, memperluas, dan sekaligus menyelaraskan berbagai program dan kegiatan pendidikan karakter yang sudah dilaksanakan (Kementerian Pendidikan dan Budaya, 2016, p.5).

Termasuk pendidikan karakter melalui pembelajaran di kelas telah menjadi salah satu opsi strategi dalam Penguatan Pendidikan Karakter kebangsaan berbasis kelas melalui pendekatan struktur kurikulum pada masing-masing mata pelajaran di sekolah. Salah satunya melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang memiliki perannya sebagai salah satu mata pelajaran yang begitu strategis dan sangat berkontribusi secara teoritis maupun praktis dalam membangun wawasan kebangsaan dan memperkuat karakter peserta didik. Mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 (Presiden Republik Indonesia, 2013), Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat

Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada perspektif global dalam buku "*Citizenship for the 21st Century*", Cogan & Derricott (1998, pp. 1-2) menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan tidak lagi terfokus pada pendekatan konvensional yang hanya mengembangkan pengetahuan tentang bagaimana pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya memberikan hak-hak dan kewajiban warga negara sehubungan dengan negara dan pengembangan rasa identitas nasional. Namun pendekatan terhadap Pendidikan Kewarganegaraan di abad ke-21 harus bersifat multidimensional yang meliputi pengembangan karakter pribadi dan mencakup komitmen terhadap pemikiran dan tindakan dengan cara yang memperhitungkan dimensi lokal, nasional, regional, dan global.

SMK Negeri 5 Yogyakarta merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan di daerah Yogyakarta dengan beberapa jurusan yang berbasis pada pengembangan industri seni kreatif. SMK Negeri 5 Yogyakarta memiliki komitmen melalui visi-misinya dengan mendukung penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang menyiapkan lulusan berkompetensi sesuai kebutuhan industri seni kreatif yang siap berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional. Melalui pengembangan jurusan seni SMK Negeri 5 Yogyakarta turut berkontribusi dalam memperkuat pengembangan industri ekonomi kreatif di Yogyakarta sebagai salah satu komoditas unggulan dalam menghadapi persaingan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Maka untuk mendukung pengembangan strategi pendidikan karakter tersebut maka di tahun 2016 SMK Negeri 5 Yogyakarta telah melakukan upaya penguatan karakter berbasis pembelajaran di kelas. Dalam konteks menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, penguatan karakter di SMK Negeri 5 Yogyakarta telah diintegrasikan dalam kurikulum mata pelajaran di sekolah termasuk dalam penyelenggaraan pembelajaran PPKn yang memadukan antara strategi pembelajaran materi PPKn dengan pengembangan budaya pembelajaran berbasis kelas. Berdasarkan latar belakang tersebut, belum diketahui bagaimana upaya sekolah memperkuat karakter peserta didik sehingga menarik untuk dilakukan penelitian mengenai strategi penguatan karakter bangsa melalui pembelajaran PPKn menghadapi Ma-

syarakat Ekonomi ASEAN di SMK Negeri 5 Yogyakarta.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dalam penelitian ini, berkaitan dengan strategi penguatan karakter bangsa melalui pembelajaran PPKn menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN di SMK Negeri 5 Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Mei sampai Agustus 2017 yang dilakukan di SMK Negeri 5 Yogyakarta di Jalan Kenari No. 71 Yogyakarta. Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan bersumber dari observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yang alam penggunaannya peneliti akan mengambil sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, yaitu orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan oleh peneliti, dalam hal ini sumber data penelitian ini yaitu kepala sekolah, seluruh guru PPKn, dan peserta didik SMK Negeri 5 Yogyakarta.

Peneliti sebagai *researcher as key instrument* yang mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi, observasi perilaku, atau wawancara dengan para partisipan (Creswell, 2015, p.261). Langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam/mencatat informasi (Creswell, 2015, p.266).

Proses pengujian keabsahan data yang dilakukan adalah dengan *member checking*, dependabilitas, memperpanjang masa keikutsertaan, dan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan pengecekan data dan beberapa sumber, cara dan waktu yang berbeda. Peneliti melakukan triangulasi sumber dan metode.

Langkah-langkah analisis data mengadopsi dari Creswell (2015, 277). Dalam hal ini analisis data kualitatif melibatkan proses mengolah dan mempersiapkan data, membaca keseluruhan data, menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data, menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan (*setting*, orang-

orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis), menunjukkan deskripsi dan tema-tema dan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif. Pada langkah terakhir dalam menganalisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mengidentifikasi Nilai Karakter Religius, Nasionalis, dan Karakter Kerja Menghadapi MEA

Tahap yang pertama yaitu guru mengidentifikasi nilai karakter yang akan diperkuat dalam pembelajaran PPKn. Guru PPKn SMK Negeri 5 Yogyakarta memiliki pemahaman yang baik atas pentingnya kemampuan dalam mengidentifikasi nilai karakter yang akan diintegrasikan dalam pembelajaran. Hal tersebut merupakan salah satu kualifikasi untuk menjadi guru Pendidikan Kewarganegaraan yang efektif dalam pendidikan karakter. Menurut Cholisin (2011, pp. 14-19) guru perlu memahami dengan baik mengenai konsep dan indikator karakter yang hendak dinternalisasikan kepada peserta didik. Tanpa pemahaman yang baik mengenai nilai karakter tersebut, maka sulit bagi guru untuk membuat Silabus, RPP, dan melaksanakan praktek pembelajarannya secara efektif.

Identifikasi terhadap nilai-nilai karakter diungkapkan oleh guru sebagai langkah awal yang penting dalam strategi perencanaan untuk menyesuaikan dan mengadaptasikan dengan kompetensi global. Namun dalam hasil penelitian, identifikasi nilai karakter menurut guru tetap mengacu pada Pancasila sebagai sumber filosofis nilai dasar bagi pengembangan nilai karakter bangsa yang akan dikembangkan dalam strategi perencanaan pembelajaran PPKn.

Pertama, nilai karakter religius. Guru berpandangan bahwa nilai karakter yang bersumber pada religiusitas merupakan nilai dasar yang perlu diperkuat dalam pembelajaran PPKn. Dalam konsep penguatan pendidikan karakter (PPK) yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2016, p.8), religius merupakan nilai karakter utama yang ditekankan karena langsung bersumber pada keberadaan dan keterkaitan hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama makhluk hidup. Nilai-nilai karakter religius yang perlu diperkuat

menurut guru PPKn diantaranya yaitu jujur, amanah, kepedulian, toleransi antaragama, anti kekerasan, dan persahabatan dan cinta kebersihan (lingkungan). Adanya nilai karakter religius dalam pembelajaran PPKn dapat memberikan penguatan pada karakter peserta didik dalam mempertimbangkan nilai karakter global yang bersebrangan dan tidak sesuai dengan norma keagamaan.

Kedua, nilai karakter nasionalis. Nilai karakter nasionalisme yang diperkuat dalam pembelajaran PPKn menurut guru antara lain yaitu cinta terhadap tanah air, semangat bangsa, taat hukum, disiplin, integritas, berprestasi, menghormati perbedaan. Penguatan nilai karakter nasionalisme yang dilakukan guru dalam perencanaan pembelajaran PPKn merupakan langkah yang sejalan dengan misi PPKn sebagai pendidikan nasionalisme. Sebagaimana yang disampaikan Maftuh (2008, p. 137), bahwa misi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nasionalisme. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat ditumbuhkan dan ditingkatkan rasa bangsa atau nasionalisme siswa, sehingga mereka lebih mencintai, merasa bangsa, dan rela berkorban untuk bangsa dan negaranya.

Ketiga, yaitu nilai karakter kerja yang meliputi kerja keras, tangguh, kreatif, inovatif, profesional, gotong royong, dan jiwa wirausaha. Pengembangan nilai karakter dalam menghadapi MEA diwujudkan dengan pentingnya penguatan karakter kerja yang tidak hanya menasar pada karakter moral yang dinilai sebagai langkah strategis dalam mempersiapkan peserta didik menghadapi ketatnya persaingan profesionalitas sumber daya manusia dunia kerja di era MEA. Pengembangan nilai karakter merupakan inisiasi oleh kepala sekolah yang dikembangkan dalam visi dan misi SMK Negeri 5 Yogyakarta yaitu menghasilkan tamatan yang unggul, mampu berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional serta mengembangkan nilai-nilai karakter budaya bangsa, jiwa wirausaha, dan anti korupsi.

Gagasan nilai karakter kerja oleh SMK Negeri 5 Yogyakarta tersebut sesuai dengan pemahaman Fadillah & Lilif (2013, p. 35), bahwa dalam pelaksanaan pendidikan karakter setidaknya juga perlu mencangkup nilai kerja sebagai upaya untuk menanamkan pada diri peserta didik, untuk senantiasa bekerja keras dan tidak mudah bergantung pada orang lain. Selain itu, kunci utama untuk

memenangkan persaingan dalam MEA 2015 bukan terletak pada seberapa besar kekayaan alam di suatu negara melainkan terletak pada sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi faktor yang paling mendasar dalam memenangkan persaingan global pada MEA 2015 (Harmanto, 2015, p. 21).

Menganalisis Cakupan Materi PPKn yang Relevan dengan Isu Nasionalisme, Regional, dan Internasional

Pada tahap tersebut guru PPKn SMK Negeri 5 Yogyakarta melakukan analisis Kompetensi Dasar (KD) pada silabus dan muatan nilai karakter dalam ruang lingkup materi PPKn. Upaya analisis terhadap KD dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ketersediaan cakupan materi pada mata pelajaran PPKn yang memuat nilai-nilai karakter. Langkah guru untuk menganalisis nilai-nilai tersebut penting dilakukan karena ruang lingkup materi pelajaran PPKn yang cukup luas. Mengingat dalam Kurikulum 2013 (Presiden Republik Indonesia, 2013), dimensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memuat program Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara meliputi Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi materi pokok Pendidikan Kewarganegaraan.

Sedangkan dalam dimensi ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan yang kemukakan oleh Print (1999, p.2), maka setidaknya dalam dimensi materi *Civic Education* meliputi tentang: (1) hak dan kewajiban warganegara; (2) pemerintah dan lembaga; (3) sejarah dan konstitusi; (4) identitas nasional; (5) sistem hukum dan aturan hukum; (6) manusia, hak-hak politik, ekonomi, sosial; (7) prinsip-prinsip dan proses demokrasi, partisipasi warga aktif dalam isu-isu kewarganegaraan; (8) perspektif internasional; dan (9) nilai-nilai kewarganegaraan demokratis.

Pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa materi pelajaran terkait dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) secara eksplisit hanya dicontohkan dalam materi PPKn kelas XII yaitu pada Bab 6 “Strategi Indonesia dalam Menyelesaikan Ancaman Terhadap Negara”. Selain itu guru mengaitkan isu MEA sebagai tambahan materi dalam kegiatan pembelajaran. Pada cakupan materi pelajaran BAB 5 tentang

“Peran Indonesia Dalam Hubungan Internasional”. Pada cakupan materi pelajaran PPKn buku siswa kelas XI ketersediaan muatan materi PPKn menghadapi isu MEA yaitu BAB 7 tentang “Menatap Tantangan Integrasi Nasional”. secara eksplisit tidak terdapat cakupan pembahasan materi yang berkaitan langsung dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Sedangkan pada materi pelajaran kelas X, secara eksplisit tidak terdapat cakupan pembahasan materi yang berkaitan langsung dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Namun dalam hasil penelitian dapat diketahui bahwa guru tetap memanfaatkan ketersediaan cakupan materi pada pelajaran PPKn dengan menganalisis materi dan nilai-nilai karakter yang relevan dengan MEA untuk diperkuat dalam proses pembelajaran PPKn. Pada kelas X guru mengoptimalkan penguatan karakter melalui ketersediaan materi pelajaran PPKn pada buku siswa yang memuat nilai-nilai karakter bangsa yang mampu dinilai mempersiapkan karakter peserta didik menghadapi MEA.

Apabila mengacu pada *Concepts at The Core of Education for Citizenship in a Democracy* (Patrick & Vontz, 2001, p. 46), maka ketersediaan dimensi tentang konsep sistem ekonomi bebas terbuka (*Market Economy-free and open economic system*) dan isu-isu publik (*Types of Public Issues*) yang meliputi kesamaan, kesatuan dan keberagaman identitas budaya dibutuhkan dalam konsep inti pendidikan kewarganegaraan di era demokrasi. Melalui gagasan konsep pendidikan kewarganegaraan tersebut, maka upaya analisis terhadap kompetensi dasar dan muatan nilai karakter yang berkaitan dengan adanya isu identitas bangsa dan Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam materi pelajaran PPKn mutlak untuk dijadikan sebagai komponen pengetahuan kewarganegaraan (*the civic knowledge component*).

Penguatan Nasionalisme Berbasis Budaya Melalui Lagu Kebangsaan dan Lagu Wajib Nasional

Strategi penguatan nilai karakter nasionalis dilakukan melalui pendekatan budaya dengan membaca teks Pancasila, lagu bangsa, dan lagu wajib nasional. Dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan secara berurutan, namun guru melakukannya dengan secara bergantian pada setiap pertemuan pembelajaran. Strategi tersebut digagas oleh kelompok guru

PPKn di awal tahun 2016 selain karena rasa khawatir terhadap adanya kebijakan MEA di tahun 2015 juga karena banyaknya peserta didik SMK Negeri 5 Yogyakarta yang tidak hafal Pancasila dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hal tersebut menunjukkan besarnya kepedulian dan kesadaran guru PPKn terhadap pengembangan nilai karakter nasionalis di era MEA.

Penguatan nilai-nilai karakter nasionalis dalam pembelajaran PPKn di SMK Negeri 5 Yogyakarta menjadi suatu kewajiban yang dilakukan oleh guru beserta peserta didik. Strategi tersebut dikembangkan melalui pendekatan budaya menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” serta lagu wajib nasional yang diantaranya yaitu lagu “Rayuan Pulau Kelapa, Dari Sabang Sampai Merauke, Satu Nusa Satu Bangsa, dan Indonesia Pusaka”. Kegiatan menyanyikan lagu bangsa dijadikan sebagai salah satu strategi penguatan nilai karakter nasionalisme yang diselenggarakan pada setiap kegiatan pendahuluan pembelajaran PPKn. Dalam pelaksanaannya tidak hanya dilakukan oleh peserta didik namun juga diikuti dan dipimpin oleh guru dengan berdiri tegak sempurna serta dinyanyikan bersama-sama.

Nilai-nilai karakter nasionalisme yang diperkuat yaitu cinta tanah air, semangat bangsa, kedisiplinan, dan tanggungjawab. Berdasarkan konsep penguatan pendidikan karakter (PPK) (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016, p.8) dipaparkan bahwa melalui adanya penguatan nilai nasionalis diharapkan peserta didik memiliki cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

Gerakan Melek Informasi dengan Budaya Literasi Berbasis Religi dan IPTEK

Strategi penguatan karakter gerakan melek informasi dengan budaya literasi berbasis religi dikembangkan oleh guru PPKn melalui pelaksanaan budaya literasi membaca Al-qur’an bagi yang beragama Islam. Namun dalam penguatan karakter melalui gerakan literasi juga mengikutsertakan peserta didik yang berbeda agama (*non-muslim*) dengan membaca kitab suci sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Peserta didik *non-muslim* dise-

diakan tempat pada ruang tersendiri yang disediakan oleh sekolah agar kegiatan literasi berjalan dengan kondusif. Kegiatan literasi tersebut juga dilakukan dengan cara mendengarkan lantunan ayat suci beserta terjemahan maknanya yang diperdengarkan melalui *sound system* oleh guru. Kegiatan gerakan literasi dijadikan sebagai salah satu strategi penguatan nilai-nilai karakter religius yang juga diselenggarakan pada setiap kegiatan awal pembelajaran PPKn setelah menyanyikan lagu kebangsaan.

Sedangkan strategi yang kedua yaitu guru memberdayakan gerakan meleak informasi dengan budaya literasi berbasis IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi). Pada pelaksanaan budaya literasi berbasis IPTEK, penerapannya tidak selalu di awal pembelajaran, namun juga dapat diintegrasikan pada kegiatan inti melalui sintak metode pembelajaran yang wajib diterapkan oleh guru dengan melibatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam prosesnya. Strategi tersebut dikembangkan melalui pelaksanaan budaya literasi membaca dari berbagai sumber informasi baik dari buku-buku bacaan maupun media cetak koran.

Pada konteks pengembangan budaya literasi berbasis IPTEK tersebut, maka strategi pelaksanaan literasi ilmu pengetahuan dikembangkan melalui pendekatan teknologi berbasis internet. Peserta didik juga diperkenankan untuk membaca dan menyimak melalui media berbasis teknologi internet seperti berita *on line* berupa artikel maupun video berita yang dapat diakses melalui *handphone*, tablet, dan laptop. Strategi tersebut dilakukan dengan menyesuaikan dengan Kompetensi Dasar materi pelajaran PPKn yang akan dibahas sehingga terdapat kesesuaian antara literasi yang dilakukan dengan materi yang akan dibahas.

Gerakan meleak informasi berbasis religi dan IPTEK yang dilakukan dalam pembelajaran PPKn sebagai strategi penguatan karakter menghadapi arus persaingan MEA yang membutuhkan kepekaan terhadap berbagai arus informasi berbasis teknologi yang berkembang pesat. Seperti yang diungkapkan oleh Nurohman (2014, p. 5) bahwa meleak informasi menjadi pilar kemajuan dunia pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidikan yang akan menelorkan agen-agen perubahan (*agent of change*) yang berkualitas, sebab dijalankan menggunakan sistem pendidikan yang berkualitas, pengajar yang berkualitas, dan sumber-sumber pengajaran yang berkuali-

tas. Indriyanto (2011, p.90-92) turut menuturkan bahwa penyelenggaraan pendidikan karakter tidak hanya menghubungkan peserta didik sebagai pribadi yang berkarakter keilmuan (akademis) tetapi juga menumbuhkan kesadaran peserta didik sebagai sesama makhluk Tuhan (religius) yang mencintai dan bangga sebagai bangsa Indonesia (nasionalis).

Pembahasan Isu MEA Sebagai Tantangan Non-Militer di Bidang Ekonomi Melalui Metode *Discovery Learning* dan *Problem Based Learning*

Pada hasil penelitian pula dapat dipahami strategi dalam rangka penguatan karakter bangsa dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, guru PPKn SMK Negeri 5 Yogyakarta menggunakan pendekatan pembelajaran yang mengacu pada prinsip kurikulum 2013 yaitu pendekatan keilmuan/ saintifik. Selain itu guru PPKn pada umumnya telah memilih dan menggunakan dua metode pembelajaran yaitu *discovery learning* dan *problem based learning* dengan strategi diskusi dan presentasi. Melalui metode tersebut diharapkan siswa memiliki keterampilan yang dibutuhkan pada abad XXI, seperti kecakapan berpikir kritis (*critical thinking*), berpikir kreatif (*creative thinking*), kecakapan berkomunikasi (*communication skill*), dan kerja sama dalam pembelajaran (*collaborative learning*) (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016, p.28-29).

Penelitian strategi penguatan karakter pada pelaksanaan pembelajaran PPKn dilakukan pada salah satu pembahasan tentang isu MEA yaitu kelas XI pada Bab 7 tentang "Mewaspadaai Tantangan Integrasi Nasional". Pada pelaksanaan pembelajaran tersebut, dilakukan sebanyak empat kali pertemuan. Guru menerapkan metode *discovery learning* dan *problem based learning* dengan strategi diskusi kelompok dan presentasi. Pada penggunaan metode *discovery learning* guru PPKn memanfaatkan keberadaan sintak pembelajaran sebagai upaya penguatan karakter.

Isu masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dibahas oleh guru dan peserta didik dalam proses diskusi kelompok yang menganalisis lima topik pembahasan yang terdiri dari ancaman militer, ancaman non militer di bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pada langkah awal metode pembelajaran terdapat tahap pemberian stimulasi

(*stimulation*), pada tahap ini guru PPKn terlihat banyak melibatkan peran peserta didik dalam proses kegiatan mental melalui kegiatan pemutaran dan pengamatan terhadap satu video tentang “ancaman integrasi nasional” dengan tiga peristiwa sekaligus yaitu tentang masuknya kapal-kapal asing ke dalam wilayah kedaulatan Indonesia, perkembangan kecanggihan teknologi di era globalisasi, dan video terkait masuknya barang-barang/ produk impor.

Pada tahap identifikasi masalah (*problem statement*), peserta didik diberi kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang relevan terhadap tayangan video tentang “ancaman integrasi nasional” tersebut. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan pertanyaan dan diikuti dengan merumuskan jawaban sementara atas solusi pertanyaan masalah. Menurut guru pada tahap mengidentifikasi masalah tersebut penguatan karakter ditekankan pada keterampilan dan karakter peserta didik yang mampu berpikir kritis melihat permasalahan, bertanggungjawab dan peduli.

Meskipun materi tentang MEA tidak dijelaskan secara eksplisit dalam buku materi peajaran buku siswa, selama proses pembelajaran guru dan peserta didik terlihat tidak hanya menggunakan buku sebagai sumber informasi tunggal. Pada tahap pengumpulan data (*data collection*) tersebut peserta didik dilibatkan kembali untuk pengembangan kemampuan literasi berbasis IPTEK. Strategi tersebut dilakukan guru pada proses pembelajaran dengan membuka akses kepada peserta didik dengan mengizinkan untuk memanfaatkan berbagai teknologi media informasi dari berbagai sumber di internet melalui akses internet dengan menggunakan *handphone*, tablet, dan laptop pribadi.

Selama tahap pembelajaran berlangsung, terlihat peran peserta didik yang begitu aktif mendominasi proses pembelajaran. Melalui tahap pembelajaran tersebut peneliti melihat terdapat proses penguatan karakter yang dibangun yaitu tanggungjawab, peduli, dan gotong-royong yang dibangun melalui aktivitas saling bekerjasama saling membantu untuk memberikan kontribusi dalam mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Menurut pemikiran Lickona (1988, pp. 420-423) pengembangan karakter dengan membangun sebuah komunitas di kelas yang memungkinkan peserta didik saling mengenal satu sama lain sebagai individu, akan membantu untuk saling

menghormati, saling peduli, dan rasa tanggung jawab kepada kelompok (*building self esteem and a sense of community*).

Pada tahap pengolahan data (*data processing*), informasi yang diperoleh masing-masing kelompok dijadikan sebagai bahan dasar diskusi antaranggota kelompok. Diskusi pada tahap pengolahan data dilakukan untuk menarik kesimpulan tentang pentingnya pemahaman dan strategi yang perlu dibangun oleh bangsa untuk menghadapi MEA tantangan dan ancaman non militer dibidang ekonomi. Fokus penguatan karakter pada strategi diskusi pada tahap ini adalah kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, menghargai pendapat orang lain, percaya diri, dan mempengaruhi orang lain melalui tata cara beargumentasi yang baik (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016, p.31).

Pada tahap penyajian hasil (*verification*), setiap kelompok dengan bimbingan guru diminta untuk menyajikan hasil identifikasi dengan strategi presentasi di depan kelas dan dilanjutkan dengan kegiatan diskusi tanya jawab antarkelompok. Pada tahap penyajian hasil tersebut terdapat penguatan karakter peserta didik melalui penggunaan strategi presentasi. Dalam konsep Penguatan Pendidikan Karakter (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016, p.31), Strategi presentasi akan memperkuat kemampuan untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi peserta didik.

Pada tahap presentasi tersebut diketahui bahwa isu MEA dijadikan sebagai salah satu contoh bentuk ancaman non-militer dalam bidang ekonomi. Pembahasan MEA lebih dibahas pada tataran definisi dan bentuk-bentuk kerjasama yang dikembangkan. Salah satunya berupa kemudahan atas masuknya produk-produk asing yang diperdagangkan di Indonesia. Pembahasan tentang MEA juga dikaji pada tataran strategi bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman non militer dibidang ekonomi. Pertama, strategi yang dilakukan untuk menghadapi ancaman non militer dibidang ekonomi yaitu dengan dibutuhkannya sikap tegas berupa kebijakan pemerintah terhadap segala bentuk pengaruh negatif yang datang dari luar sebagai wujud dari globalisasi. Kedua, membangun kesadaran masyarakat dan generasi bangsa terhadap pentingnya jiwa nasionalisme dengan menggunakan produk-produk karya dari dalam negeri.

Penguatan karakter melalui penggunaan metode pembelajaran yang digunakan guru untuk meningkatkan kompetensi MEA juga menggunakan metode *problem based learning*. Guru berasumsi bahwa metode pembelajaran *problem based learning* (PBL) memiliki strategi yang memberikan stimulasi untuk membangun karakter peserta didik yang kritis dalam memandang suatu permasalahan, berani mengenali setiap permasalahan yang baru, dan turut serta memberikan partisipasi penyelesaian masalah. Seperti konsep yang digagas oleh Berkowitz & Bier (2004, pp. 32-75) bahwa melalui pembelajaran kooperatif atau melalui keterampilan resolusi konflik antarteman sebaya penting untuk dilaksanakan yang akan berdampak pada peningkatan kualitas proses pembelajaran kelas sehingga lebih bermakna dan efektif terhadap pembentukan karakter.

Pada hasil penelitian pelaksanaan pembelajaran melalui metode berbasis masalah (*problem based learning*) berlangsung, peserta didik tetap diupayakan oleh guru untuk turut berpartisipasi memberikan peran dan kontribusi dalam penyelidikan masalah. Menurut Patrick & Leming (2001, p. 49), guru harus membantu siswa mengembangkan pemahaman yang canggih tentang kapasitas kognitif serta partisipatif yang penting dan hubungannya dengan teori maupun praktik kewarganegaraan demokratis. Pada tahap tersebut guru mendorong kreatifitas dan keterampilan peserta didik dalam bekerjasama mengumpulkan informasi berupa data-data penting dan relevan dari berbagai sumber. Untuk memberikan dampak nyata pada perkembangan karakter menurut Lickona (1988, p.420-423), salah satu strategi yang harus dilakukan di kelas yaitu *learning to cooperate and help others*. Guru harus mengembangkan keterampilan dan semangat kerja sama, peserta didik harus menjalin kerja sama dalam kehidupan ruang kelas.

Pada tahap akhir peserta didik belajar kreatif dalam mengembangkan dan terampil mengkomunikasikan dan menyajikan hasil keputusan atas pemecahan masalah yang dibahas bersama dalam suatu diskusi. Tahap tersebut menurut Lickona (1988, p. 420-423) merupakan strategi *Participatory decision making*. Strategi ini memberikan dorongan motivasi menuju arah tindakan dengan mewajibkan peserta didik untuk belajar berpartisipasi dalam memecahkan suatu konflik. Pengambilan keputusan partisipatif memiliki nilai khusus kare-

na mengajarkan demokrasi melalui demokrasi, melatih warga yang aktif dengan mewujudkan peserta didik menjadi warga negara yang aktif dalam kehidupan sekolah mereka.

Maka pemilihan dan penggunaan metode *problem based learning* sesuai dengan strategi penguatan karakter melalui pembelajaran PPKn menghadapi beragam permasalahan isu politik, sosial-budaya, dan isu ekonomi di era MEA. Hal tersebut dikarenakan kaum muda harus diajarkan untuk membahas isu publik yang kontroversial (CPI) karena akan meningkatkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang lebih demokratis (Hess, 2001, p. 88). Selain itu adanya unsur model diskusi dalam metode pembelajaran PPKn menurut Avery, Levy & Simmons (2013, p.108), sudah semestinya menjadi sarana integral dalam dimensi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu lembaga pendidikan sekolah yang memiliki misi untuk mendidik siswa untuk memahami esensi kewarganegaraan secara serius.

Melalui hasil temuan penelitian dalam pelaksanaan pembelajaran PPKn dalam rangka penguatan karakter menghadapi MEA tersebut, SMK Negeri 5 Yogyakarta telah menerapkan penguatan karakter melalui metode pembelajaran berbasis saintifik yang berpusap pada peserta didik dan banyak mengaitkan dengan perkembangan isu-isu bangsa. Upaya tersebut sesuai dengan prinsip Kurikulum 2013 bahwa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran guru perlu memberikan pembelajaran dengan permasalahan-permasalahan yang relevan dan kontekstual (Gustin & Suharno, 2015, p.146). Prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang mandiri bertujuan untuk mengembangkan intelektualitasnya. Winatapura (2015, p.15) menegaskan bahwa secara konseptual dan programatik Kurikulum 2013 diarahkan untuk menghasilkan lulusan lembaga pendidikan dengan totalitas kemampuan sebagai warga negara Indonesia yang cerdas dan baik, sekaligus menjadi sumberdaya manusia yang inovatif dan mampu memerankan diri secara efektif pada era MEA tersebut.

Temuan penelitian juga diperkuat dengan adanya konfirmasi oleh peserta didik SMK Negeri 5 Yogyakarta. Melalui pelaksanaan metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru PPKn diakui oleh peserta didik telah memberikan penguatan karakter pada sikap

berani tampil (percaya diri), belajar bicara (komunikatif), menghargai perbedaan pendapat (toleransi), belajar dengan usaha sendiri (mandiri), kekompakan (solidaritas), dan kerja sama (gotong-royong). Maka pembelajaran PPKn di SMK Negeri 5 Yogyakarta sesuai dengan prinsip yang disampaikan oleh Samsuri (2011, p.40) bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan harus bersifat kontekstual dan penuh makna (*meaningfulness*) harapannya agar dapat membangun kecerdasan, keterampilan dan karakter warga negara Indonesia yang ideal. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan karakter yang efektif.

Evaluasi penguatan karakter bangsa dalam pelaksanaan pembelajaran PPKn

Pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran PPKn di SMK Negeri 5 Yogyakarta tidak luput dari adanya tahap evaluasi pembelajaran. Evaluasi penting dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan penguatan karakter yang telah dilaksanakan berdasarkan kriteria tertentu. Pada hasil penelitian, terdapat dua pendekatan evaluasi yang dilakukan guru PPKn SMK Negeri 5 Yogyakarta.

Pertama, evaluasi penguatan karakter dilakukan dengan bersama-sama melalui kegiatan diskusi (curah pendapat) antarguru PPKn yang dilakukan dengan waktu yang fleksibel dalam rentang waktu satu minggu hingga per semester. Kegiatan dilakukan dalam bentuk refleksi masing-masing guru berdasarkan pengalaman pelaksanaan strategi masing-masing guru. Kegiatan evaluasi oleh guru meliputi pembahasan karakteristik peserta didik, latar belakang keluarga peserta didik, model penanganan, faktor-faktor kendala dalam penguatan karakter selama pembelajaran, dan solusi bersama untuk pemecahan masalah. Pada kegiatan tersebut guru PPKn SMK Negeri 5 Yogyakarta juga berkoordinasi kepada kepala sekolah untuk mendapatkan saran dan memberikan rekomendasi tindak lanjut melalui rapat dinas jajaran guru pengajar dengan tujuan melakukan evaluasi perbaikan terhadap strategi penguatan karakter berbasis pembelajaran di kelas.

Kedua, secara umum guru PPKn juga melakukan penilaian pembelajaran PPKn sesuai ketentuak Kurikulum 2013 yaitu pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Namun evaluasi karakter oleh guru PPKn

dilakukan dengan penilaian pada pembelajaran PPKn difokuskan pada penilaian sikap. Untuk penilaian karakter dilakukan melalui penilaian sikap yang pertama diwujudkan dengan teknik observasi dengan bentuk instrumen lembar penilaian observasi. Kegiatan pengamatan dengan teknik observasi dilakukan langsung oleh guru terhadap perilaku peserta didik baik selama proses pembelajaran di kelas berlangsung dan aktifitas peserta didik di luar kelas. Penilaian sikap yang kedua yaitu dengan penilaian diri. Teknik penilaian diri dilakukan dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi sikap.

Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan evaluasi terhadap strategi penguatan karakter bangsa melalui pembelajaran PPKn di SMK Negeri 5 Yogyakarta telah dilakukan secara kolektif, programatik, dan komprehensif yang melibatkan evaluasi antarguru PPKn dan evaluasi pada penilaian pembelajaran. Hal tersebut terlihat dengan adanya wujud konsolidasi yang fleksibel namun intensif antarguru PPKn dan kepala sekolah untuk perbaikan strategi penguatan karakter yang lebih efektif. Upaya evaluasi tersebut sesuai dengan prinsip evaluasi pelaksanaan pendidikan karakter yang menurut Lickona, Schaps, & Lewis (2007, p.2) bahwa efektifitas evaluasi pendidikan karakter harus menilai karakter sekolah secara menyeluruh, fungsi staf sekolah sebagai pendidik karakter dan cakupan karakter siswa yang baik.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan strategi yang dilaksanakan oleh guru PPKn pada dasarnya terbagi pada tiga tahapan strategi. Pertama, strategi penguatan karakter bangsa pada perencanaan pembelajaran PPKn dilakukan oleh guru dengan cara; (1) mengidentifikasi nilai-nilai karakter religius, nasionalis, dan nilai karakter kerja untuk penguatan menghadapi MEA dan; 2) menganalisis cakupan materi PPKn yang relevan dengan isu nasionalisme, regional dan internasional.

Kedua, strategi penguatan karakter bangsa pada tahap pelaksanaan pembelajaran PPKn dilakukan oleh guru dan peserta didik dengan cara; (1) penguatan nasionalisme berbasis budaya dengan menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu wajib nasional; (2) gerakan

melek informasi dengan budaya literasi berbasis religi dan IPTEK; dan (3) guru dan peserta didik membahas isu MEA sebagai salah satu bentuk tantangan non-militer di bidang ekonomi melalui metode pembelajaran aktif yaitu *discovery learning* dan *problem based learning*. Ketiga, evaluasi penguatan karakter dilakukan oleh guru dengan kegiatan curah pendapat antarguru PPKn dan penilaian sikap dengan teknik observasi dan penilaian diri.

Namun berdasarkan simpulan di atas seiring pesatnya perkembangan global tidak menutup kemungkinan munculnya beragam tantangan yang mempengaruhi efektivitas strategi penguatan karakter dalam pembelajaran PPKn. Maka dari itu penulis memberikan beberapa saran yang relevan dalam mendukung pengembangan strategi penguatan karakter melalui pembelajaran PPKn di SMK Negeri 5 Yogyakarta.

Pertama, guru perlu melakukan penguatan karakter pada perencanaan dengan mendesain RPP yang tidak hanya menerapkan prinsip berdasarkan Kurikulum 2013. Namun juga perlu menyusun strategi penguatan karakter pada RPP yang memuat fokus penguatan karakter dengan menambah ciri khas SMK Negeri 5 Yogyakarta. Kedua, guru diharapkan mampu menerapkan metode pembelajaran aktif PPKn lainnya seperti *project based learning*. Namun dengan tetap dengan prinsip mempertimbangkan karakteristik materi dan perbedaan karakteristik kemampuan peserta didik. Ketiga, guru perlu mengembangkan model evaluasi dengan sistem monitoring terhadap pelaksanaan strategi penguatan pendidikan karakter peserta didik SMK Negeri 5 Yogyakarta dengan membangun komitmen *stakeholder*.

Daftar Pustaka

- Abdurofiq, A. (2014). Menakar pengaruh masyarakat ekonomi ASEAN 2015 terhadap pembangunan indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya* Syar'i, 2, 249-256
- Avery, P. G., Levy, S. A., & Simmons, A. M. (2013). Deliberating controversial public issues as part of civic education 1. *The Social Studies*, 3, 105-114
- Badan Pusat Statistik. (2015). Statistik Indonesia: *Statistic yearsbook of Indonesia 2015*, (No. Publikasi. 03220.1509). Indonesia, BPS: Badan Pusat Statistik
- Berkowitz, M. W., & Bier, M. C. (2004). based character education. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 1, 72-85
- Cholisin. 2011. *Peran Guru PKN dalam Pendidikan Karakter*. Disampaikan pada Kuliah Umum Jurusan PPKn FKIP UAD Yogyakarta, 5 Februari 2011
- Cogan, J., Derricott, R., & Derricott, R. (1998). *Citizenship for the 21st century: An international perspective on education*. Kogan Page: London
- Creswell, J. W. 2015. *Research design qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (A. Fawaid, Trans). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fadillah, M., & Lilif, K. M. (2013). *Pendidikan karakter usia dini*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Gustin, G., & Suharno, S. (2015). Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan Pendekatan Saintifik. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 2, 144-157.
doi:<http://dx.doi.org/10.21831/hsjpi.v2i2.7666>
- Harmanto, B. (2015). *Penguatan nilai karakter keindonesiaan memasuki mea 2015 dalam tinjauan komunikasi bahasa*. Prosiding Seminar Nasional 30 Mei 2015. "Memperkuat Nilai Karakter Keindonesiaan Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015". Ponorogo: Laboratorium Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- Hess, D. (2001). Teaching to public controversy in a democracy. In Patrick, J. J., & Leming, R. S, Eds. *Principles and Practices of Democracy in the Education of Social Studies Teachers*. Civic Learning in Teacher Education. ERIC Clearinghouse for Social

- Studies/Social Science Education, Bloomington, IN 47408-2698. 87-109
- Indriyanto, B. (2011). *Pembangunan karakter: tugas besar sekolah dan masyarakat*. Jakarta: Majalah Diknas Kementerian Pendidikan RI. Hlm 90-92
- Kementerian Pendidikan dan Budaya. (2016). *Konsep dan pedoman penguatan pendidikan karakter*. Jakarta: Tim PPK Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). *Bahan pelatihan (penguatan metodologi pembelajaran berdasarkan nilai-nilai budaya untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa)*. Jakarta: Balitbang Puskur
- Lickona, T. (1988). Four strategies for fostering: character development in children. *The Phi Delta Kappan*, 6, 419-423
- Maftuh, B. (2008). Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme melalui pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Educationist*, 2, 134-144
- McKinsey Global Institute. (2012). *Perekonomian nusantara: menggali potensi terpendam Indonesia*. McKinsey & Company. Organisasi Nonprofit. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Nurohman, A. (2014). Signifikansi literasi informasi (*information literacy*) dalam dunia pendidikan di era global. *Jurnal Kependidikan*, 1, 5-25
- Patrick, J. J., & Leming, R. S. (2001). *Principles and Practices of Democracy in the Education of Social Studies Teachers. Civic Learning in Teacher Education*. ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education, Bloomington, IN 47408-2698
- Patrick, J. J., & Vontz, T. S. (2001). Components of education for democratic citizenship in the preparation of social studies teachers. *Principles and Practices of Democracy in the Education of Social Studies Teacher*, 3. 38-49
- Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah RI Nomor, 32 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor, 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan. (2013).
- Schwab, K. (Ed.). (2015). *Competitiveness report 2015-2016*. Geneva, WEF: World Economic Forum
- UNDP. (2015). *Human Development Report 2015: Work for human development* (No. E.15.111.B.1). Washington, DC: Communication Development Incorporated
- Winataputra, U. S. (2015). *Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai wahana pencerdasan dan penumbuhan karakter Pancasila: menjawab tantangan masyarakat ekonomi asep (MEA)*. Prosiding Seminar Nasional 30 Mei 2015. "Memperkuat Nilai Karakter Keindonesiaan Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015". Ponorogo: Laboratorium Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.